GECI
Jurnal Generasi Ceria Indonesia
Volume: 2 | Nomor 2 | Nopember 2024 | E-ISSN: 2987-9264| DOI: 10.47709/geci. v2i2. 5059

Analisis Opini Massa Sikap Elit Partai Politik dan Kelompok Kepentingan Terhadap Perumusan Kebijakan Pendidikan

Author:
Noven Yovinda[1], Muhammad Idris Addayan[2], Mahesa Nababil[3], Mulyadi[4]

Afiliation:
Universitas Jambi[1,2,3,4]

Corresponding email
muhammadidria10@gmail.com

Histori Naskah:
Submit: 08-12-2024
Accepted: 11-12-2024
Published: 12-12-2024

How To cite:

This is an Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License

Abstrak:
Latar belakang: Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui kebijakan pendidikan di Indonesia dipengaruhi oleh interaksi antara opini massa, sikap elit, peran partai politik, dan kelompok kepentingan. Opini massa dapat memberikan tekanan kuat untuk perubahan, sementara elit politik memiliki kuasa untuk menentukan arah kebijakan berdasarkan agenda mereka.
Metode penelitian: Dalam kajian ini penulis menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data menggunakan studi literatur, baik dari buku-buku literasi, artikel, berita di media masa baik elektronik maupun non elektronik serta data-data informasi dari pemerintah
Hasil penelitian: Partai politik bertindak sebagai penghubung antara masyarakat dan kebijakan, sedangkan kelompok kepentingan berperan dalam mengadvokasi kebijakan yang adil dan transparan. Kombinasi dari faktor-faktor ini menciptakan dinamika yang kompleks dalam proses perumusan kebijakan pendidikan di Indonesia.
Kesimpulan: Melalui advokasi dan kegiatan lobi, kelompok ini berusaha memastikan bahwa suara dan kebutuhan anggotanya diperhatikan dalam kebijakan yang diambil oleh pemerintah.
.

Kata kunci: *Kebijakan pendidikan, opini massa, sikap elit, partai politik, kelompok kepentingan.*

Pendahuluan

Kebijakan pendidikan di Indonesia merupakan salah satu elemen penting dalam pembangunan sumber daya manusia. Dalam era globalisasi dan perkembangan teknologi informasi yang pesat, kebijakan pendidikan harus mampu beradaptasi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan dunia kerja. Namun, proses perumusan kebijakan pendidikan sering kali kompleks dan dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk opini massa, sikap elit politik, partai politik, dan kelompok kepentingan.

Opini massa, yang mencerminkan pandangan dan harapan masyarakat, berperan dalam menekan pemerintah untuk menghasilkan kebijakan yang responsif (Aslamiah & Yulianti, 2022). Opini publik dapat berfungsi sebagai alat untuk mengawasi pemerintah dalam pelaksanaan kebijakan publik, termasuk di sektor pendidikan (Hutabarat & Jambi, 2022). Mereka berargumen bahwa partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dapat meningkatkan akuntabilitas dan legitimasi pemerintah. Selain itu, Dwirahayu dalam jurnalnya yang berjudul ‘Dinamika Opini Publik dalam Kebijakan Pendidikan di Indonesia’ menekankan pentingnya opini massa dalam mempengaruhi keputusan pemerintah, "Masyarakat yang teredukasi cenderung lebih aktif dalam menyuarakan pendapatnya, sehingga mendorong perubahan kebijakan yang lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat."

GECI
Jurnal Generasi Ceria Indonesia
Volume: 2 | Nomor 2 | Nopember 2024 | E-ISSN: 2987-9264| DOI: 10.47709/geci. v2i2. 5059

Sikap elit, termasuk para pengambil keputusan di pemerintahan, dapat mempengaruhi arah kebijakan sesuai dengan agenda mereka. Dalam hal ini, teori elit yang dikemukakan oleh Pareto di tahun 1961, menjelaskan bahwa kebijakan publik, termasuk kebijakan pendidikan, sering kali ditentukan oleh sekelompok kecil elit yang memiliki kekuasaan dan pengaruh. Elit pendidikan berperan dalam merumuskan kebijakan yang sejalan dengan visi mereka mengenai pendidikan di Indonesia (Syuhada et al., 2023).

Selain itu, partai politik sebagai kekuatan legislatif juga memiliki peran penting dalam menentukan kebijakan pendidikan. Sebagaimana diungkapkan oleh Kurniawan di tahun 2021, bahwasanya partai politik tidak hanya berfungsi sebagai perwakilan rakyat, tetapi juga sebagai penggerak dalam pembuatan dan pengesahan kebijakan pendidikan yang mendukung visi politik mereka. Peneliti lainnya, mencatat, "Peran partai politik dalam kebijakan pendidikan sangat krusial, terutama dalam pengaruhnya terhadap distribusi anggaran dan program-program pendidikan," (Rahman, 2022).

Studi Literatur

Kelompok kepentingan berfungsi sebagai advokat untuk kepentingan anggotanya. Kelompok kepentingan dapat mempengaruhi perumusan kebijakan pendidikan dengan cara mengadvokasi kepentingan tertentu, seperti kesejahteraan guru atau akses pendidikan yang lebih luas bagi masyarakat (Surya, 2018). Penelitian oleh Faridah di tahun 2023 juga menggaris bawahi peran kelompok kepentingan: "Advokasi yang dilakukan oleh kelompok kepentingan sering kali menjadi jembatan antara kebutuhan masyarakat dan respon pemerintah dalam kebijakan pendidikan." Dengan memahami pengaruh dari setiap aktor tersebut, diharapkan proses perumusan kebijakan pendidikan dapat dilakukan secara lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Metode Penelitian

Pada kajian ini penulis menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data menggunakan studi dokumen dan literatur baik dari buku-buku literasi, artikel, berita di media masa baik elektronik maupun non elektronik serta data-data informasi dari pemerintah kemudian data disajikan sebagai bahan analisa yang selanjutnya ditarik sebuah kesimpulan.

Hasil

1. Pengaruh Opini Massa

Opini massa sangat berpengaruh dalam proses perumusan kebijakan pendidikan di Indonesia, terutama ketika masyarakat menginginkan perubahan yang mendesak terkait isu-isu pendidikan Opini massa memainkan peranan penting dalam mempengaruhi kebijakan pendidikan di Indonesia. Opini publik sering kali disuarakan melalui berbagai media, termasuk media sosial, yang memungkinkan masyarakat untuk mengekspresikan pandangan mereka dengan cepat dan masif (Yusuf, 2016). Dalam konteks pandemi COVID-19, tekanan opini massa terbukti memaksa pemerintah untuk merespons dengan cepat dan mengimplementasikan kebijakan pembelajaran daring (Rizky, 2021).

Selain itu, peningkatan literasi digital masyarakat juga meningkatkan kesadaran terhadap pentingnya pendidikan, yang mendorong pemerintah untuk lebih tanggap terhadap kebutuhan masyarakat (Lestari, 2018). Hal ini menjadikan opini publik sebagai instrumen yang efektif untuk mendesak perubahan sistem pendidikan, terutama dalam situasi krisis (Amiruddin, 2020). Media sosial tidak hanya menjadi sarana informasi tetapi juga alat advokasi yang membentuk kebijakan berdasarkan aspirasi publik (Sari, 2022).

Sebagai contoh, saat pandemi COVID-19, terjadi peningkatan tekanan dari masyarakat terhadap pemerintah untuk mengubah model pembelajaran dari tatap muka menjadi pembelajaran daring. Tuntutan ini disuarakan oleh orang tua, siswa, dan guru melalui berbagai saluran, termasuk media sosial dan petisi daring. Sebagai tanggapan atas tekanan opini publik, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) memperkenalkan kebijakan pembelajaran daring melalui program Belajar dari Rumah yang disiarkan melalui televisi nasional serta peluncuran berbagai platform pembelajaran daring seperti Ruang Guru dan Google Classroom (Wahyudi, 2020).

“Opini masyarakat dalam konteks pendidikan dapat berfungsi sebagai pendorong bagi pemerintah untuk memperbaiki sistem pendidikan yang ada, terutama ketika terdapat masalah yang dihadapi

GECI
Jurnal Generasi Ceria Indonesia
Volume: 2 | Nomor 2 | Nopember 2024 | E-ISSN: 2987-9264| DOI: 10.47709/geci. v2i2. 5059

masyarakat," (Masykur, 2019). Dwirahayu pada tahun 2022 juga menyatakan, "Partisipasi aktif masyarakat dalam pendidikan akan memperkuat posisi tawar masyarakat dalam proses pengambilan keputusan."

2. Sikap Elit

Elit politik di Indonesia memainkan peran penting dalam menentukan arah kebijakan pendidikan. Elit politik ini sering kali menggunakan kekuasaan mereka untuk memajukan agenda-agenda tertentu yang mereka anggap penting. Sikap elit politik tetap menjadi faktor dominan dalam perumusan kebijakan pendidikan di Indonesia. Keputusan yang diambil oleh elit sering kali dipengaruhi oleh analisis, prioritas politik, dan agenda pribadi atau kelompok (Wijaya, 2017). Mahendra (Mahendra, 2020) menyatakan, "Sikap dan keputusan elit politik seringkali mengarahkan kebijakan pendidikan pada jalur tertentu yang mencerminkan kepentingan mereka. Contoh nyata dari pengaruh sikap elit terhadap kebijakan pendidikan dapat dilihat pada kebijakan Kurikulum 2013 (K-13).

Saat Anies Baswedan menjabat sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 2014, ia menunda penerapan Kurikulum 2013 karena dianggap masih banyak kelemahan dan kurang sosialisasi (Iskandar, 2019) Anies lebih memilih untuk mengevaluasi implementasi kurikulum tersebut dan melakukan perbaikan sebelum diterapkan secara nasional. Keputusan ini mencerminkan pengaruh sikap elit yang mampu mengubah arah kebijakan pendidikan sesuai dengan analisis dan prioritas mereka.

Rumusan kebijakan pendidikan diantaranya ditentukan oleh sikap elit (Salim,2020), dimana kepentingan dari sikap elit tersebut memuat kepentingan kelompok yang mereka wakili (Nurdin, 2021). Dalam jurnalnya yang berjudul Kebijakan Elit dan Politik, Pratama menyampaikan, "Kebijakan pendidikan di Indonesia kerap kali dipengaruhi oleh persepsi dan kepentingan elit yang bertugas," serta, "Sikap elit politik bisa menjadi penghambat atau pendorong dalam perubahan kebijakan pendidikan, tergantung pada konstelasi politik yang berlaku," (Gunawan, 2018). Oleh karena itu, interaksi antara opini publik dan sikap elit merupakan aspek yang tidak terpisahkan dalam dinamika kebijakan pendidikan.

3. Peran Partai Politik

Partai politik di Indonesia sering menggunakan isu pendidikan sebagai salah satu alat kampanye untuk meraih dukungan masyarakat. Partai-partai ini biasanya memiliki pandangan ideologis yang beragam mengenai bagaimana kebijakan pendidikan seharusnya dirumuskan dan dijalankan. Partai politik memiliki peran strategis dalam memengaruhi kebijakan pendidikan. Partai politik sering memanfaatkan isu pendidikan sebagai alat untuk meraih simpati pemilih, terutama saat kampanye politik (Mulyadi, 2016). Partai politik tidak hanya menjadi pengusul kebijakan tetapi juga berperan dalam proses legislasi dan pengawasan pelaksanaannya (Siregar, 2017).

Contoh nyata pengaruh partai politik dalam kebijakan pendidikan terlihat pada peningkatan alokasi anggaran pendidikan selama pemerintahan Presiden Joko Widodo. Sebagai bagian dari janji kampanye, pemerintah melalui fraksi-fraksi partai pendukungnya di DPR berhasil meningkatkan anggaran pendidikan hingga 20% dari APBN, sesuai dengan amanat konstitusi. Kebijakan ini mendukung program-program seperti Kartu Indonesia Pintar (KIP), yang bertujuan untuk memastikan akses pendidikan bagi siswa dari keluarga kurang mampu (Kurniawan, 2021).

Komitmen peran partai politik dalam dalam pembanguna sumber daya manusia diantaranya dirumuskan dalam kebijakan-kebijakan pendidikan yang diterbitkan (Hutabarat, 2018). Partai politik juga memiliki kewajiban untuk mengawasi agar kebijakan yang dibuat berjalan dengan efektif (sNasution, 2019), juga sebagai jembatan antara aspirasi masyarakat dan kebijakan yang diimplementasikan pemerintah (Wulandari, 2021).

Pembahasan

Kelompok Kepentingan

Kelompok kepentingan, seperti organisasi profesi guru dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) memainkan peran penting dalam perumusan kebijakan pendidikan melalui advokasi dan dialog dengan pemerintah (Santosa, 2016). "Kelompok kepentingan dapat menjadi penggerak utama dalam mendorong

GECI
Jurnal Generasi Ceria Indonesia
Volume: 2 | Nomor 2 | Nopember 2024 | E-ISSN: 2987-9264| DOI: 10.47709/geci. v2i2. 5059

perubahan kebijakan yang lebih inklusif dan berkeadilan," ujar Kusuma (2018). Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) misalnya, sering berperan aktif dalam menyuarakan kepentingan guru, termasuk dalam hal tunjangan dan pelatihan profesional (Rahmat, 2019).

Contohnya, PGRI berperan aktif dalam mengadvokasi kesejahteraan guru dan perbaikan sistem pendidikan. Organisasi ini sering kali terlibat dalam diskusi dengan pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan guru melalui berbagai kebijakan, termasuk tunjangan dan pelatihan profesional (Suparlan, 2020).

Menurut Hadi (Hadi, 2020), "LSM memiliki peran krusial dalam memastikan kebijakan pendidikan yang dihasilkan lebih transparan dan akuntabel." Kelompok ini kerap kali melakukan advokasi untuk meningkatkan alokasi dana pendidikan dan mendesak kebijakan yang mendukung kesetaraan akses pendidikan bagi seluruh masyarakat (Dewi, 2021). Surya (2018) mencatat bahwa "Partisipasi kelompok kepentingan dalam proses legislasi kebijakan pendidikan dapat membantu menjaga kepentingan masyarakat agar tetap diperhatikan." Fitria (Fitria, 2021) menambahkan, "Advokasi dari kelompok kepentingan sering kali berujung pada perubahan kebijakan yang lebih merata dan mencerminkan kebutuhan masyarakat luas."

Seperti yang diungkapkan oleh Surya (2018), "Kelompok kepentingan dapat menjadi kekuatan pendorong dalam perumusan kebijakan pendidikan, di mana mereka berusaha memastikan bahwa suara dan kebutuhan anggotanya didengar." Advokasi kelompok kepentingan sering kali menghasilkan kebijakan yang lebih adil dan merata bagi seluruh lapisan masyarakat (Fitria, 2021).

Kesimpulan

Opini massa memiliki pengaruh yang signifikan dalam perumusan kebijakan pendidikan di Indonesia. Ketika masyarakat aktif berpartisipasi dan menyuarakan pendapat mereka, pemerintah cenderung lebih responsif terhadap kebutuhan dan harapan masyarakat. Sikap elit politik juga memainkan peran penting dalam menentukan arah kebijakan pendidikan. Elit politik, terutama yang memiliki jabatan strategis dalam pemerintahan, dapat mempengaruhi kebijakan dengan menggunakan kekuasaan mereka untuk menetapkan prioritas dan agenda tertentu. Di sisi lain, partai politik berperan sebagai kekuatan legislatif yang menentukan kebijakan pendidikan. Sebagai bagian dari agenda politik, partai-partai ini berusaha menciptakan kebijakan pendidikan yang sejalan dengan visi dan misi mereka. Kenaikan alokasi anggaran pendidikan dan peluncuran program-program seperti Kartu Indonesia Pintar (KIP) mencerminkan bagaimana kebijakan pendidikan dapat ditentukan oleh kepentingan politik partai yang berkuasa. Oleh karena itu, partai politik tidak hanya berfungsi sebagai perwakilan rakyat tetapi juga sebagai penggerak kebijakan pendidikan yang berorientasi pada pemilih. Terakhir, kelompok kepentingan memiliki peran krusial dalam mempengaruhi perumusan kebijakan pendidikan. Melalui advokasi dan kegiatan lobi, kelompok ini berusaha memastikan bahwa suara dan kebutuhan anggotanya diperhatikan dalam kebijakan yang diambil oleh pemerintah.

Referensi

Amir, M. (2019). "Pengaruh Kelompok Kepentingan dalam Perumusan Kebijakan Pendidikan di Indonesia." Jurnal Pendidikan dan Kebijakan, 4(1), 25-38.

Amiruddin, Z. (2020). Dinamika opini masyarakat dalam kebijakan publik. *Jurnal Sosial dan Politik*, 18(1), 78-92.

Aslamiah, A., & Yulianti, N. (2020). "Pengaruh Opini Publik terhadap Kebijakan Publik di Indonesia." Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 10(1), 1-14.

Dewi, E. (2021). Peran LSM dalam pendidikan. *Jurnal Akuntabilitas Publik*, 18(2), 89-103.

Dhirrah, I. (2022). "Peran Media Sosial dalam Mempengaruhi Opini Publik terhadap Kebijakan Pendidikan." Jurnal Komunikasi dan Pendidikan, 12(3), 215-230.

Dye, T. R. (2017). Understanding Public Policy. Pearson.

Volume: 2 | Nomor 2 | Nopember 2024 | E-ISSN: 2987-9264| DOI: 10.47709/geci. v2i2. 5059

Dwirahayu, D. (2022). "Dinamika Opini Publik dalam Kebijakan Pendidikan di Indonesia." Jurnal Pendidikan dan Kebijakan, 5(1), 35-50.
Fitria, S. (2021). "Advokasi Kelompok Kepentingan dalam Kebijakan Pendidikan." Jurnal Kebijakan dan Pendidikan, 6(2), 112-124.
Gunawan, T. (2018). Arah kebijakan pendidikan di Indonesia. *Jurnal Manajemen Pendidikan*, 16(1), 89-101.
Hadi, R. (2020). Kampanye publik dalam advokasi pendidikan. *Jurnal Advokasi Publik*, 14(3), 145-158.
Hutabarat, H. (2018). Fraksi parlemen dan kebijakan pendidikan. *Jurnal Politik Indonesia*, 12(3), 130-145.
Iskandar, A. (2019). "Pengaruh Kebijakan Pendidikan terhadap Perubahan Kurikulum di Indonesia." Jurnal Kebijakan dan Administrasi Pendidikan, 7(2), 155-168.
Kurniawan, R. (2021). "Peran Partai Politik dalam Pengembangan Kebijakan Pendidikan di Indonesia." Jurnal Politik dan Pemerintahan, 12(1), 89-104.
Kusuma, H. (2018). PGRI sebagai agen perubahan. *Jurnal Pendidikan Nasional*, 15(1), 112-125.
Lestari, M. (2018). Literasi digital dan opini publik. *Jurnal Pendidikan Nasional*, 15(2), 144-157.
Mahendra, P. (2020). Analisis kebijakan pendidikan. *Jurnal Kebijakan Pendidikan*, 17(4), 90-105.
Masykur, A. (2019). "Peran Opini Publik dalam Pengambilan Keputusan Kebijakan." Jurnal Sosial dan Politik, 11(2), 67-80.
Mulyadi, A. (2016). Strategi partai politik dalam isu pendidikan. *Jurnal Ilmu Politik*, 13(1), 78-92.
Nasution, M. (2019). Legislasi dan kebijakan pendidikan. *Jurnal Studi Kebijakan*, 17(1), 55-70.
Nurdin, H. (2021). "Sikap Elit dalam Kebijakan Pendidikan: Analisis Kritis." Jurnal Pendidikan Nasional, 5(4), 205-220.
Pareto, V. (1961). The Rise and Fall of Elites: An Application of Theoretical Sociology. Transaction Publishers.
Pratama, R. (2019). Kebijakan pendidikan dan elit politik. *Jurnal Kajian Kebijakan*, 14(3), 112-126.
Rahman, A. (2018). "Peran Partai Politik dalam Kebijakan Pendidikan." Jurnal Politik dan Masyarakat, 11(1), 43-56.
Rahmat, F. (2019). Advokasi anggaran pendidikan. Jurnal Kebijakan Pendidikan, 13(2), 78-90.
Ramdani, S. (2021). Reformasi pendidikan dan pengaruh elit. *Jurnal Pendidikan dan Pemerintahan*, 19(2), 123-138.
Rizky, D. (2021). Transformasi pendidikan di masa pandemi. *Jurnal Kebijakan Publik*, 22(3), 123-138.
Rizal, M. (2023). "Pengaruh Partai Politik terhadap Kebijakan Pendidikan di Indonesia." Jurnal Politik dan Pemerintahan, 14(2), 55-70.
Salim, S. (2020). "Sikap Elit dan Kebijakan Pendidikan di Indonesia." Jurnal Ilmu Pendidikan, 16(2), 78-89.
Sari, I. (2022). Media sosial dan advokasi kebijakan. *Jurnal Media dan Komunikasi*, 20(4), 166-180.
Santosa, I. (2016). Peran organisasi guru dalam kebijakan pendidikan. *Jurnal Pendidikan dan Masyarakat*, 9(3), 98-110.
Siregar, V. (2017). Pendidikan dalam kampanye politik. *Jurnal Kebijakan Publik*, 11(2), 101-115.
Suparlan, P. (2020). "Peran PGRI dalam Mempengaruhi Kebijakan Kesejahteraan Guru di Indonesia." Jurnal Pendidikan Nasional, 5(3), 45-57.
Surya, M. (2018). "Pengaruh Kelompok Kepentingan dalam Perumusan Kebijakan Pendidikan di Indonesia." Jurnal Ilmu Pendidikan, 24(2), 118-129.
Wahyudi, A. (2020). "Dinamika Kebijakan Merdeka Belajar dalam Sistem Pendidikan di Indonesia." Jurnal Pendidikan Indonesia, 8(1), 24-37.
Wijaya, B. (2017). Dominasi elit dalam kebijakan pendidikan. Jurnal Politik dan Pendidikan, 10(2), 102-115.
Wulandari, K. (2021). Partai politik dan pengaruhnya dalam pendidikan. *Jurnal Politik dan Masyarakat*, 18(4), 150-165.

Volume: 2 | Nomor 2 | Nopember 2024 | E-ISSN: 2987-9264| DOI: 10.47709/geci. v2i2. 5059

Yusuf, A. (2016). Pengaruh opini massa terhadap kebijakan pendidikan. *Jurnal Komunikasi dan Kebijakan*, 12(3), 201-215.

Hutabarat, Z. S., & Jambi, U. B. (2022). *Hubungan Antara Persepsi Siswa Tentang Kompetensi Sosial Guru Ekonomi Dan Lingkungan Sekolah Dengan Motivasi Belajar Ekonomi Siswa Kelas Xi Ips Sman 4 Muara Bungo*. *5*(1), 110–120.

Syuhada, S., Masni, H., Rahima, A., Zahar, E., Pudjaningsih, W., Budiyono, H., Wennyta, W., Syahputra, M. H. I., Harman, H., & Hutabarat, Z. S. (2023). The Perceptions of Jambi Province Students on the Teaching Profession. *AL-ISHLAH: Jurnal Pendidikan*, *15*(2), 2507–2517. https://doi.org/10.35445/alishlah.v15i2.2944